

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Asia khususnya Asia Tenggara merupakan kawasan yang rawan konflik antar negara, sehubungan dengan adanya berbagai klaim terhadap batas teritorial negara yang tumpang tindih. Peragaan kekuatan (*show off force*) menjadi semakin sering digunakan sebagai cara untuk menyatakan kekuasaan suatu negara atas perairan di kawasan laut atau sebuah pulau yang sedang diperebutkan. Teori “defensif” mengatakan peningkatan kapabilitas militer bertujuan untuk meningkatkan efek gentar agar musuh tidak melakukan aktivitas pelanggaran di wilayah kedaulatan negara. Maka peningkatan kapabilitas militer oleh Indonesia menjadi menarik untuk dipelajari, apakah tujuannya semata-mata untuk pertahanan diri, atau lebih dari itu, misalnya mengantisipasi perilaku negara-negara lain yang dianggap ancaman bagi Indonesia.

Sejauh ini, kepemilikan teknologi dan belanja peralatan militer yang telah dilakukan Indonesia dapat dianggap sebagai perilaku strategis dan merupakan bagian dari usaha untuk menjaga kedaulatan NKRI. Namun pada saat yang sama juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbesar kekuasaan dan posisi tawar Indonesia terhadap negara-negara lain, khususnya yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi untuk meningkatkan kapabilitas militer. Seperti penandatanganan kontrak pembelian tiga kapal selam kelas *Changbogo* yang dibeli dari Korea Selatan, ditujukan untuk menambah kekuatan dari dua kapal selam yang telah dimiliki Indonesia sebelumnya. Penambahan armada kapal selam ini oleh Indonesia

mengikuti pembelian kapal oleh negara tetangga (Malaysia dan Singapura). Indonesia juga membeli *main battle tank* leopard dari Jerman<sup>1</sup>, yang dalam rancangan akan ditempatkan di Kalimantan yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Malaysia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Tentara Nasional Indonesia), Pramono Edhie mengatakan bahwa modernisasi *alutsista* (alat utama sistem persenjataan) itu untuk penyeteraan dengan negara tetangga<sup>2</sup>.

Sementara itu pengembangan teknologi roket terus berjalan dimana LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) memegang tanggung jawab tersebut. Diharapkan dengan terciptanya kemampuan penguasaan teknologi rudal atau peluru kendali yang mandiri, penguasaan akan teknologi strategis ini akan membuat Indonesia menjadi salah satu bagian dari negara satelit di dunia. Pengembangan roket ini juga di dukung oleh pembuatan pabrik bahan bakar roket yakni propellan cair, yang mulai beroperasi pada tahun 2012<sup>3</sup>. Dalam menguasai teknologi roket negara-negara harus melakukan riset-riset secara mandiri untuk dapat menghasilkan sebuah roket. Uji coba peluncuran roket nasional yang baru-baru ini dilakukan oleh Indonesia sempat menjadi perbincangan di kawasan Asia Tenggara<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Main Battle Tank (MBT) merupakan tank tempur utama dengan bobot berkisar antara 40-60 ton, MBT merupakan bagian esensial dari elemen tempur modern yang cukup memberikan efek deterrent bagi musuh

<sup>2</sup>Tank Leopard, agar TNI Setara dengan Negara Tetangga, diakses dari <http://news.detik.com/read/2012/01/13/130104/1814711/10/tank-leopard-agar-tni-setara-dengan-negara-tetangga>, (terakhir diakses tanggal 1 september 2012 Jam 22.33)

<sup>3</sup>Website resmi kementerian riset dan teknologi Indonesia, diakses dari <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/11215/print>, (terakhir diakses tanggal 1 september 2012 Jam 23.30)

<sup>4</sup>Roket Indonesia getarkan australia, singapura, dan Malaysia, diakses dari <http://indonesiandefense.com/2011/09/roket-indonesia-getarkan-australia.html>, (terakhir diakses tanggal 4 september 2012 jam 14.36 WIB)

Mulai aktifnya Indonesia dalam upaya peningkatan kapabilitas militer tentunya tidak terlepas dari dinamika ancaman yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga telah melihat semakin meningkatnya kekuatan militer Cina dari tahun ke tahun dan keinginan Cina terhadap penguasaan Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh sebagian negara-negara di Asia Tenggara sebagai miliknya. Di tambah adanya rencana Amerika Serikat untuk memindahkan kekuatan militernya ke wilayah Asia Pasifik, yang sebelumnya hanya berada di sekitar kawasan Timur Tengah, tentu ini menambah tekanan pada Indonesia untuk melakukan peningkatan kekuatan militer guna menghadapi berbagai kemungkinan konflik baru yang muncul akibat kehadiran kekuatan militer sekutu AS.

Dalam proses peningkatan belanja militer dan modernisasi peralatan tempur yang dilakukan oleh Indonesia saat ini, Indonesia tidak hanya melakukan pembelian alat-alat yang bersifat material, tetapi juga termasuk *transfer of technology* untuk membuat peralatan tempur sendiri tanpa harus bergantung dengan negara lain<sup>5</sup>. Selain itu Indonesia juga telah melakukan revitalisasi terhadap industri pertahanan diantaranya PT.PAL (Industri galangan kapal), PT.DI (Dirgantara Indonesia), PT.PINDAD (Industri manufaktur), PT.DAHANA (Industri bahan peledak), dan beberapa perusahaan lain yang termasuk kedalam industri strategis<sup>6</sup>. Adanya rancangan undang-undang mengenai pertahanan Indonesia membuat semakin kuatnya usaha-usaha Indonesia untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer. Hingga saat ini RUU yang telah disahkan berjumlah dua RUU dari total 16 RUU

---

<sup>5</sup>*Transfer of technology* dalam konteks yang dimaksud adalah dalam setiap pembelian persenjataan dari luar negeri, negara penjual harus menyertakan *blueprint* teknologi-teknologi senjata tersebut untuk negara pembeli, Majalah Defender edisi 41, tahun 2008

<sup>6</sup> Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terberdaya, KBBI online tahun 2012

yang direncanakan, yakni UU industri pertahanan dan UU veteran RI, RUU yang masih dalam pembahasan adalah, RUU komponen cadangan, RUU TNI, RUU senjata api dan bahan peledak, RUU hukum dan disiplin militer, RUU peradilan militer, RUU rahasia negara, RUU bela negara, RUU keamanan nasional, RUU hukum pidana militer, RUU keadaan bahaya, RUU komponen pendukung, RUU lembaga permasyarakatan, RUU pengaktifan kembali purnawirawan prajurit sukarela, RUU prajurit wajib dalam keadaan darurat militer, RUU darurat perang, RUU prajurit wajib, RUU pengembangan dan pemanfaatan industri strategis nasional, RUU veteran<sup>7</sup>.

Apa yang kontroversial dari perilaku keamanan Indonesia? Dibalik kesungguhan untuk mewujudkan ASEAN Community, dan visi SBY tentang “*zero enemy*” nyatanya penambahan kekuatan militer tetap dianggap sebagai solusi untuk keamanan nasional. Indikasi pertama dapat ditunjukkan disini adanya kenaikan anggaran militer secara konsisten dalam 8 tahun terakhir (terhitung dari tahun 2004-2012). Yang lainnya adalah siklus ancaman dan provokasi militer, misalnya antara Indonesia dan Malaysia. Disamping itu juga ada gejala naiknya intensitas konflik antar negara, seperti yang terindikasi dalam konflik *Spratly*.

Peningkatan kapabilitas militer juga bisa mengundang campurtangan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara yang menambah kuat hasrat untuk perlombaan kekuatan militer di kawasan tersebut. atas Indonesia. Apakah sebagai pemasok persenjataan, teknologi, tenaga ahli, maupun sebagai penopang strategi

---

<sup>7</sup> 14 RUU pertahanan belum tergarap, diakses dari <http://www.jurnalparlemen.com/view/3335/14-ruu-bidang-pertahanan-belum-tergarap.html>, (terakhir diakses tanggal 25 juni 2013 jam 08.38 WIB)

militer campur tangan negara-negara besar akan meningkatkan ancaman keamanan di kawasan. Singkatnya peningkatan kapabilitas militer Indonesia mengandung implikasi perubahan kekuasaan, sekaligus adanya ancaman untuk kedaulatan Indonesia, keutuhan wilayah dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Nyatanya sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baik itu periode I 2004-2009 maupun periode ke II 2009-2014, terus berupaya melakukan peningkatan anggaran belanja pertahanan. Bahkan SBY sudah membentuk suatu *grand design* tentang pemenuhan *minimum essential force* (MEF) oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono<sup>8</sup>, MEF ini dilaksanakan dalam tiga tahap, tahap pertama (2010-2014) tahap kedua (2015 – 2019) dan tahap ketiga (2020-2024)<sup>9</sup>. Rencana pemenuhan *MEF* ini dilakukan untuk memenuhi kemampuan armada tempur Indonesia yang dapat memenuhi standar atau kemampuan modern sebagai senjata pemukul strategis. Anggaran pertahanan yang diterima oleh kementerian pertahanan untuk memodernisasi peralatan tempur pun tergolong cukup besar, sekedar gambaran, terhitung sejak tahun anggaran 2004 –

---

<sup>8</sup>*Minimum Essential Force (MEF)* merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada Tahun 2009 telah dirumuskan Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk mengoreksi terhadap faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Adapun tujuannya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama. merupakan istilah yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merujuk kepada kekuatan militer Indonesia (TNI) yang masih berada di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia

<sup>9</sup> Kebijakan Penyelarasan Kekuatan Minimum Essential Force Komponen Utama, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.19 Tahun 2012

2005 hingga 2010 impor persenjataan Indonesia meningkat sekitar 84 %. Hanya saja peningkatan impor persenjataan ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya yakni Malaysia meningkat menjadi 722 % dalam lima tahun terakhir dan Singapura meningkat menjadi 146 % dalam lima tahun terakhir (2005-2010)<sup>10</sup>. Peningkatan anggaran pertahanan ini dimulai dari tahun anggaran 2004 -2005 sebesar 21,7 triliun, tahun 2006 sebesar 28,2 triliun, tahun 2007 sebesar 29,578 triliun, tahun 2008 sebesar 32 triliun, tahun 2009 sebesar 33,67 triliun, tahun 2010 sebesar 42,3 triliun, tahun 2011 sebesar 45,2 triliun, tahun 2012 sebesar 72,54 triliun dan untuk tahun 2013 dialokasikan sekitar 77,7 triliun rupiah<sup>11</sup>. Gejala-gejala ini sekaligus menggambarkan kompetisi di bidang keamanan dan militer, khususnya di kawasan Asia tenggara.

Peningkatan kemampuan tempur dan kapabilitas militer oleh Indonesia sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam menjaga kedaulatan NKRI. Jika dilihat dari sejarahnya, setelah reformasi tepatnya pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 membuat segala aspek pertumbuhan kehidupan di Indonesia berjalan melambat, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun masalah pertahanan dan keamanan, sehingga saat itu membuat Indonesia rentan akan ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. Masalah pertahanan negara pada saat itu sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar peralatan tempur Indonesia masih merupakan warisan dari Perang Dunia II, tidak heran saat itu Malaysia mampu

---

<sup>10</sup> Perangi Malaysia = Lawan Australia+Inggris, diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/174731-perangi-malaysia---lawan-australia-inggris> (terakhir diakses tanggal 2 September 2012 Jam 15.30 WIB)

<sup>11</sup> Anggaran Pertahanan: Pemerintah Alokasikan Rp 77 Triliun, diakses dari <http://www.bisnis.com/articles/anggaran-pertahanan-pemerintah-alokasikan-rp77-triliun> (terakhir diakses tanggal 1 September 2012 Jam 20.54 WIB)

memanfaatkan kelengahan Indonesia dengan mengklaim dua pulau yang masih dipersengketakan diantara kedua negara, dan pada akhirnya pada tanggal 17 desember 2002 kedua pulau itu lepas dan menjadi milik Malaysia<sup>12</sup>. Lepasnya dua pulau tersebut membuat Indonesia menyadari bahwa ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI ini memang sangat nyata. Kemungkinan untuk terjadinya hal yang sama kedepannya sangat mungkin dengan melihat banyak permasalahan konflik perbatasan yang belum mencapai kesepakatan dan adanya tumpang tindih perbatasan antar negara<sup>13</sup>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran di atas beberapa keadaan bisa kita rumuskan sebagai isu keamanan dan strategis di kawasan Asia Tenggara. Pertama, secara umum terjadi kecenderungan peningkatan anggaran pertahanan di Indonesia dari 2004 hingga sekarang. Kedua, terjadi aktivitas pembelian persenjataan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang cenderung meningkat, seperti pembelian kapal selam dan tank sebagai bentuk serius dari upaya negara-negara untuk meningkatkan kapabilitas militer. Ketiga, ada potensi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara sekaligus stabilitas dan keamanan Asia Tenggara selama Indonesia di pimpin oleh SBY. Keempat, peningkatan kapabilitas militer oleh Indonesia, dengan melihat kepentingan nasional Indonesia, maka sangat logis dan bisa dianggap

---

<sup>12</sup>*Lepasnya pulau sipadan dan ligitan dari NKRI*, diakses dari <http://hankam.kompasiana.com/2011/10/16/lepasnya-pulau-ligitan-dan-sipadan-dari-nkri/>, (terakhir diakses tanggal 17 juli 2012 Jam 21.27 WIB)

<sup>13</sup>*Ambalat, wake up call from the neighbor*, diakses dari <http://analisismiliter.com/artikel/part/17/Ambalat-Wake-Up-Call-From-The-Neighbor>, (terakhir diakses tanggal 5 juni 2012 Jam 17.41 WIB)

sebagai hal yang rasional dalam rangka menanggapi ancaman yang timbul dari luar negara.

Peningkatan pertahanan yang dilakukan Indonesia saat ini erat kaitannya dengan naiknya ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sekaligus menjaga stabilitas keamanan regional. Namun pada saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas regional Asia Tenggara merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Indonesia guna menjamin keamanan dan perdamaian di lingkungan strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas terlalu banyak titik rawan yang harus diamankan oleh Indonesia di sepanjang garis perbatasan wilayahnya

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah *“Apakah tujuan dari peningkatan kapabilitas militer Indonesia di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”*

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ancaman keamanan yang muncul dari lingkungan strategis Indonesia selama periode pemerintahan SBY
2. Menganalisa upaya-upaya dan tujuan peningkatan kapabilitas militer oleh Indonesia selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono, dalam kaitannya dengan upaya peningkatan keamanan nasional.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya pemahaman tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka melindungi kedaulatan dan integritas wilayah.
2. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional Unand tentang kajian strategi dan keamanan khususnya mengenai perilaku keamanan dimana negara-negara yang menjadi fokus utama.

### **1.6 Studi Pustaka**

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan sebagai pembanding terhadap suatu penelitian yang telah dibuat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari pembandingan ini agar nantinya bisa menambah informasi yang di dapat dan dapat menghindari terjadinya pengulangan terhadap suatu penelitian.

Mengenai tujuan peningkatan kapabilitas dan modernisasi peralatan militer yang dilakukan oleh Indonesia tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyebab Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militer tersebut. Pertanyaan itu dianggap pas karena kemungkinan besar Indonesia melakukannya akibat adanya rasa terancam oleh aktivitas –aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak lain baik itu negara tetangga maupun negara lainnya atau merupakan bagian dari suatu strategi untuk menghadapi perubahan-perubahan peta keamanan yang bersifat dinamis guna menghadapi ancaman yang datang secara eksternal. Sebelumnya sudah banyak buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas

mengenai *security* di Asia Tenggara, namun penulis ingin melihat lebih jauh lagi mengenai strategi peningkatan kapabilitas militer Indonesia serta tujuan dan pemicunya. Jika dilihat lagi melalui berita-berita atau sumber-sumber yang terkait beberapa tahun terakhir, dalam hal *security* di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memang tidak terlalu berperan dan tidak begitu menjadi fokus pembicaraan. Karena faktanya saat ini kebanyakan peralatan tempur Indonesia tergolong kepada kategori uzur yang sebagian besar merupakan warisan dari Perang Dunia ke II dan kesibukan Indonesia mengurus urusan domestik seperti korupsi, terorisme, dan konflik antar ras, hal ini lah yang membuat kajian tentang peningkatan kapabilitas militer ini menjadi menarik, karena selama ini pembicaraan mengenai *security* di Asia Tenggara tidak banyak berfokus kepada peningkatan kapabilitas militer Indonesia ini.

Tentang tujuan dan pemicu peningkatan kapabilitas dan modernisasi militer Indonesia, Rizal Sukma dalam jurnalnya yang berjudul “*Indonesia’s security outlook, defence policy and regional cooperation*” dengan sub-judul “*External security problems: sovereignty, territorial disputes, border security and regional uncertainty*”<sup>14</sup>, menyatakan bahwa Indonesia mengkhawatirkan adanya ancaman eksternal yang dilakukan oleh kekuatan besar di Asia Tenggara. Indonesia juga mulai mengekspresikan kekhawatiran mereka atas tumpang tindih batas laut teritorial dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun membutuhkan sumber daya yang banyak untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut, khususnya permintaan akan kebutuhan

---

<sup>14</sup> Jurnal *Indonesia’s security outlook, defence policy and regional cooperation*, diakses dari [http://www.nids.go.jp/english/publication/joint\\_research/series5/pdf/5-1.pdf](http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series5/pdf/5-1.pdf) (terakhir diakses tanggal 31 Agustus 2012 Jam 21.55 WIB)

akan gas alam dan minyak bumi. Dalam konteks ini keamanan sumber daya menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia, dan ancaman terhadap hal tersebut merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini adanya sengketa perbatasan dan isu sengketa batas teritorial yang mana kaya akan sumber daya minyak bumi dan gas alam masih menjadikan suatu hal yang belum dapat diselesaikan melalui jalan diplomasi. Contoh : Indonesia dan Malaysia memiliki masalah perbatasan yang sangat serius, pertama, mengenai pulau Sipadan dan Ligitan, dan sekarang mengenai batas yurisdiksi Ambalat di perairan Sulawesi. Klaim Malaysia atas Ambalat dan patroli perairan yang dilakukan oleh Malaysia disekitar perairan Ambalat, sering dianggap sebagai “ancaman penggunaan kekuatan militer” oleh Indonesia<sup>15</sup>. Berbagai macam dampak dari masalah kedua negara ini membuktikan bahwa kecenderungan atas pelanggaran batas teritorial Indonesia sangat tinggi dan ancaman terhadap kedaulatan juga sangat jelas, maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan kesiapsiagaan kekuatan pertahanan<sup>16</sup>. Begitupun seperti yang dinyatakan Panglima Endriartono Sutarto klaim Malaysia terhadap wilayah teritorial Indonesia merupakan ancaman yang sangat berbahaya yang datang dari negara lain, itupun di dasari atas lemahnya aspek pertahanan Indonesia dibanding negara tetangga tersebut<sup>17</sup>. Adanya pengalaman kehilangan dua pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia dan juga sengketa Ambalat, menjadikan masalah perbatasan dan pulau-

---

<sup>15</sup>Hikmahanto Juwana, “*Isu pokok Ambalat*”, Kompas 9 Juni 2009, dikutip oleh Rizal sukma, *Indonesia’s security outlook, defence policy and regional cooperation*, jurnal publikasi dari *The national Institute for Defense Studies*

<sup>16</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hal 54.

<sup>17</sup>*Military to up spending to modernize equipment*, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2005/03/10/military-spending-modernize-equipment.html> (terakhir diakses tanggal 30 agustus 2012 Jam 13.29 WIB)

pulau terluar sebagai prioritas utama Indonesia, karena kehilangan pulau terluar tidak hanya mengancam kedaulatan negara tetapi juga kehilangan sumber daya yang terkandung di dalamnya<sup>18</sup>.

Dalam sebuah jurnal penelitian yang dikeluarkan oleh *House of Commons* dengan judul *Military Balance in Southeast Asia*<sup>19</sup>, menyatakan bahwa keamanan maritim merupakan kekhawatiran utama bagi Indonesia, banyaknya sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dan masalah tumpang tindih batas laut membuat hubungan Indonesia Malaysia sering memanas, dapat dilihat hasil yang ditimbulkan dari permasalahan ini, pada pertengahan tahun 2009 terjadi gesekan atas sengketa di zona lepas pantai Sabah di utara Kalimantan. Kedua negara masih tetap bersengketa atas kepemilikan blok Ambalat yang kaya akan sumber daya minyak bumi, dan juga tentang batas wilayah kedaulatan di Kalimantan.

Dalam jurnal penelitian ini dikatakan bahwa sengketa yang terjadi diantara kedua negara mengenai batas wilayah kedaulatan kedepannya akan menggriring kedua negaraini terlibat dalam konfrontasi militer dalam skala besar. Pada bulan juni 2011 Indonesia menambah kehadiran 700-1000 tentara nasional Indonesia di perbatasan antara kedua negara, tepatnya di Kalimantan Timur, alasan penambahan satu batalion tentara ini adalah untuk meningkatkan kemandirian di daerah teritorial Indonesia<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Agung D.Febri. "strategi penanganan pulau terluar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI", *satria: studi pertahanan, kementrian pertahanan*, vol.4, no.2, april-juni 2008 dikutip oleh Rizal sukma, *Indonesia's security outlook, defence policy and regional cooperation*, jurnal publikasi dari *The national Institute for Defense Studies*

<sup>19</sup> Tom Rutheford. *Military Balance in Southeast Asia*, House of common library research paper 11/79. 14 desember 2011

<sup>20</sup> Jane's Intelligence weekly, 11 October 2011, *Indonesia Rejects Border Conflict Claims With Malaysia* dikutip oleh Tom Rutheford *Military Balance in Southeast Asia*, research paper dari House of common UK

Dalam tulisan *IR Theory and Asia 's Maritime Teritorial Disputes* yang ditulis oleh James Manicom<sup>21</sup>, menyatakan bahwa keamanan strategis di kawasan Asia Pasifik sudah sejak lama dilihat sebagai suatu keseimbangan yang sulit. Awal pasca Perang Dingin situasi keamanan di Asia tertuju kepada masalah teritorial. Terhitung tidak kurang dari 34 sengketa teritorial di kawasan Asia Pasifik ini. Tulisan ini mengatakan bahwa realitas politik dan hal yang utama dalam pikiran pembuat kebijakan di kawasan Asia adalah mengenai integritas teritorial dan kedaulatan negara. peningkatan konsumsi energi di kawasan ini telah meningkatkan perekonomian dan nilai strategis dari batas maritim.

Dalam tulisan ini, James Manicom membahas mengenai masalah sengketa teritorial dengan 3 pendekatan hubungan internasional, yakni realisme, liberal internasionalisme, dan konstruktivisme. Dalam konteks ini, penulis mengambil contoh dari pendekatan realisme, karena ini akan berkaitan dengan teori-teori yang akan dipakai penulis untuk menjelaskan mengenai masalah ini selanjutnya. Lewat sudut pandang realis, fokus utamanya adalah adanya kapabilitas dari negara pengklaim sebagai bentuk bukti dari kemampuan dan keinginan mereka untuk memulai sebuah sengketa. Pada tahun 1990an, meningkatnya kemampuan angkatan laut negara pengklaim terhadap sengketa kepulauan *Spratly*, merupakan sebuah indikasi dari meningkatnya tensi di kawasan tersebut. Adanya sengketa di kepulauan *Spratly* tersebut telah mempengaruhi pertumbuhan nasional Cina, dan kepentingan nasional Cina menjadi sebuah ambisi.

---

<sup>21</sup>James Manicom “*IR Theory and Asia's Maritime Territorial Disputes*”, school of international studies paper. Flinders University. september 2006

Setelah kehancuran pasar Asia yang berdampak kepada pengurangan pengeluaran dan belanja pertahanan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, para realis menganalisa, bahwa kehadiran pasukan Amerika di kawasan Asia Tenggara kemungkinan akan menimbulkan efek tangkal terhadap agresi dan keinginan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam pemikiran realis keinginan negara-negara untuk mau memulai suatu tantangan di kawasan yang disengketakan adalah sebuah fungsi dari kapabilitas militer dan kepentingan strategis<sup>22</sup>. Adanya tumpang tindih klaim batas teritorial merupakan suatu hal yang sangat riskan melihat tingginya kebutuhan energi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang mana dibuktikan dengan pertumbuhan pengeluaran belanja pertahanan. Menurut Michael Klare, Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang sangat riskan karena menyimpan cadangan sumber energi potensial di bawah laut, dan kehadiran negara pengklaim untuk menggunakan kekuatan militer sangat besar demi mempertahankan sumber tersebut<sup>23</sup>.

Pada intinya, pendekatan realis dalam tulisan James Manicom lebih mengutamakan penggunaan *power* terhadap suatu kepentingan, dalam konteks ini adanya sengketa batas teritorial mampu membuat suatu negara melakukan peningkatan kapabilitas militer mereka, dimana jika tidak ada penyelesaian damai, penggunaan *power* merupakan jalan terakhir untuk memenangkan sengketa tersebut, terlebih dalam wilayah yang disengketakan mengandung kekayaan

---

<sup>22</sup> Jae-Hyung, L.2002."China's Expanding Maritime Ambitions In the Western Pacific and the Indian Ocean", *contemporary southeast asia* 24 (3): 549-68 dikutip oleh James Manicom *IR Theory and Asia's Maritime Territorial Disputes*, school of international studies paper. Flinders University, september 2006

<sup>23</sup> Klare, S.P.1998."The South China Sea in China's Strategic Thinking". *Contemporary southeast asia* 19(4):368-87 dikutip oleh James Manicom. *IR Theory and Asia's Maritime Territorial Disputes*, school of international studies paper. Flinders University, september 2006

sumber daya alam yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka negara yang memiliki kapabilitas militer yang kuat tentu akan berada pada pihak yang diuntungkan.

Carolin Liss dalam *working paper, the privatisation of maritime security-Maritime Security in Southeast Asia : Between a rock and a hard place?* Dalam subjudul *Securing Maritime Southeast Asia -Government Response*<sup>24</sup>, mengatakan bahwa karena perekonomian yang sukses pada pertengahan tahun 1990, negara-negara di Asia Tenggara bisa mengembangkan dan memodernisasi pertahanan mereka, termasuk kapabilitas angkatan laut mereka. Adanya peningkatan angkatan laut ini dipicu atas kekhawatiran akan klaim kepemilikan pulau-pulau dan kawasan laut. Untuk menanggapi tantangan ini maka pemerintah di negara-negara Asia Tenggara mengakuisisi beberapa kapal perang canggih, pesawat, senjata, yang bisa melakukan operasi dengan jarak yang lebih jauh dan lama dari model-model sebelumnya.

*Point* penting dari *working paper* yang dikerjakan oleh Carolin Liss ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin telah melakukan peningkatan kapabilitas militer terkait dengan adanya berbagai macam sengketa di kawasan ini, baik itu mengenai masalah pulau dan masalah perbatasan.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Richard A. Bitzinger dengan judul *A New Arms Race ? : Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions*<sup>25</sup>,

---

<sup>24</sup> Carolin Liss. *The privatisation of maritime security-Maritime security in southeast asia : Between a rock and a hard place*, Asia Research centre Working paper.No.141, Februari 2007

<sup>25</sup>Richard Bitzinger. *A New Arms Race?: Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisition*, Project Muse, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 22 number 1, April 2010

menyatakan bahwa adanya suatu kecemasan yang timbul akhir-akhir ini melihat aktifnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam melakukan peningkatan belanja peralatan tempur konvensional yang dikategorikan sudah maju. Peningkatan belanja militer ini dianggap sebagai suatu hal yang dapat membahayakan stabilitas keamanan kawasan. Dalam jurnal ini, Bitzinger memberikan rincian senjata –senjata apa saja yang di akuisisi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi rincian yang dipaparkan oleh Bitzinger hanya sebatas penjelasan umum dimana data yang di dapat oleh Bitzinger merupakan data yang dapat dirangkum dari berbagai sumber. Dalam penjelasannya mengenai peningkatan belanja militer yang dilakukan oleh Indonesia, Bitzinger melihat bahwa Indonesia yang luas daerahnya mencapai hampir 6 juta km, memerlukan kapabilitas militer yang cukup besar untuk menjaga setiap batas-batas wilayahnya dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan. Bitzinger memaparkan pembelian persenjataan oleh tiga matra yang dimiliki Indonesia (angkatan darat, laut, dan udara), ia menjelaskan bahwa niat Indonesia sebenarnya adalah untuk memodernisasi peralatan tempur yang sudah tua.

Bitzinger menjelaskan *arms race* yang sedang terjadi di kawasan Asia Tenggara disebabkan oleh adanya ancaman *extra-regional* yang diterima oleh negara-negara di kawasan ini, tepatnya dipengaruhi oleh Cina. *Point* utama dari penjelasan Bitzinger adalah bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan peningkatan kapabilitas militer dipengaruhi oleh Cina yang semakin agresif di kawasan Laut Cina Selatan. Tetapi hal yang perlu diingat bahwa, yang terlibat langsung di dalam konflik perbatasan dengan Cina hanya beberapa negara Asia Tenggara, sedangkan Indonesia tidak terlibat langsung, jadi kekurangan

Bitzinger adalah ia tidak menjelaskan kenapa Indonesia juga terlibat dalam perkembangan *arms race* dan dinamika ini melihat Indonesia tidak memiliki hubungan yang langsung dari dampak konflik Laut Cina Selatan.

## **1.7 Kerangka Teoritik dan Konseptual**

### **1.7.1 *National Interest***

National interest merupakan landasan dasar suatu negara untuk menetapkan kebijakan luar negerinya. Hans J.Morgenthau berpendapat aktor-aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara, dan dalam politik internasional negara akan selalu bertindak berdasarkan atas *national interest* mereka. *National interest* dalam pandangan realis secara umum dipahami sebagai kepemilikan *power*, yang terdiri dari tiga bagian yakni: kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan keamanan politik, ideologi dan budaya. Inilah *national interest* yang menjadi alasan suatu negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negerinya<sup>26</sup>.

Bagi Hans J.Morgenthau kepentingan nasional adalah penggunaan *power* secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kesejahteraan negara dan bangsa. Kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan- kepentingan politik yang saling bertentangan, ini bukan sesuatu yang ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifik tetapi merupakan hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung secara terus menerus. Pemerintah, melalui berbagai lembaganya, yang pada akhirnya paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-

---

<sup>26</sup>Scott Burchill.*the national interest in international relations theory*.(New York: Palgrave MacMillan, 2005), 42

kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Negara-negara akan menjadi semakin aktif bilamana kepentingan nasionalnya diancam negara lain.

Dalam konteks peningkatan kapabilitas militer Indonesia adalah pengembangan militer yang bisa digunakan sebagai *deterrence* (pencegahan) terhadap serangan negara-negara lain, sebagai bentuk reaksi dari ancaman militer yang datang dari musuh potensial. Morgenthau menekankan dalam sistem internasional interaksi antar negara tidak terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, melindungi keamanan dan kelangsungan hidupnya.

Menurut Morgenthau kemampuan minimum negara bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara dan bangsa lain. Dalam pengertian yang lebih spesifik negara-negara harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), mempertahankan rezim ekonomi politiknya (identitas politik), serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (identitas kulturalnya). Tujuan-tujuan umum ini membuat para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijakan-kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik<sup>27</sup>.

*National interest* menurut Jack C Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang

---

<sup>27</sup> Mochtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi*. LP3ES, Jakarta.141

menjadi kebutuhan yang sangat *vital* bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi<sup>28</sup>.

Menurut Kenneth Waltz, *national interest* adalah suatu hal yang dengan sendirinya terjadi secara otomatis atau seperti suatu sinyal perintah bagi pemimpin negara untuk menentukan kapan akan bergerak dan kemana akan bergerak. Waltz tidak menekankan *national interest* harus sebagai arah atau tuntunan bagi perilaku negara dalam menghadapi realitas internasional. Bagi Waltz, *national interest* muncul sebagai sebuah hal pasti (*given*) yang tak terbantahkan, yang mana hal tersebut diadopsi oleh negara untuk dicapai. Waltz menekankan dalam *national interest* masing-masing negara tentu saja berpikir yang terbaik bagi kepentingannya. Menurut Waltz<sup>29</sup>.

*To say that a country acts according to its national interests means that, having examined its security requirements, it tries to meet them. That is simple; it is also important. Entailed in the concept of national interest is the notion that diplomatic and military moves must at times be carefully planned lest the survival of states be in jeopardy. The appropriate state action is calculated according to the situation in which the state finds itself. Great power, like large firms, have always had to allow for the reactions of others. Each states chooses its own policies. To choose effectively requires considering the ends of the states in relation to its situation.*

*National interest* menurut Waltz sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Morgenthau, perbedaan tersebut adalah Morgenthau percaya bahwa pemimpin negara memiliki keterikatan dengan *national interest* dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, *national interest* digunakan sebagai referensi atau acuan bagi pemimpin negara dan setiap kebijakan luar negeri harus

---

<sup>28</sup>Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, Rienert and Wistone Inc USA, 1969, Terjemahan Wawan Juanda Abardin, 7

<sup>29</sup>Scott Burchill. *the national interest in international relations theory*. (New York: Palgrave MacMillan, 2005), hal 43

berdasarkan *national interest*. Sedangkan menurut Waltz, *national interest* adalah suatu sinyal perintah terhadap pemimpin negara yang secara otomatis membuatnya mengetahui kapan dan kemana akan bergerak selanjutnya.

Pada dasarnya, walaupun terdapat sedikit perbedaan antara Morgenthau dan Waltz, *national interest* tetap menjadi suatu hal yang mempengaruhi perilaku negara dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan luar negerinya. Segala hal yang dilakukan negara dalam penetapan *national interest* akan selalu melihat kepada realitas dunia internasional. Dan akhirnya *national interest* itu sendiri pun adalah cara bagaimana negara merumuskan suatu kepentingan agar dapat bertahan dalam politik internasional.

Kepentingan nasional bagi Indonesia adalah bagaimana mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif baik itu bagi stabilitas regional maupun global<sup>30</sup>. Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara memiliki peran yang besar dalam menjaga kestabilan kawasan dengan menjaga setiap tindakan-tindakan yang mampu memicu terjadinya ancaman terhadap destabilisasi kawasan. Stabilitas keamanan merupakan bagian yang sangat penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Penyelenggaraan fungsi pertahanan yang baik dilakukan seiring dengan perubahan-perubahan peta geopolitik yang terjadi secara global maupun regional kawasan. Kepentingan nasional Indonesia yang lain adalah bagaimana menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri<sup>31</sup>. Telah dengan jelas dinyatakan dalam buku putih pertahanan Indonesia, bahwa kepentingan nasional

---

<sup>30</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia, hal 39

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 41

Indonesia adalah menjaga kedaulatan negara dan menjaga stabilitas kawasan. Maka oleh sebab itu jika ada suatu negara yang mengancam kedaulatan Indonesia berarti berhadapan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia, yang berarti siap untuk menghadapi segala resiko yang akan terjadi.

### ***1.7.2 Non Offensive Defence***

Dalam menjelaskan perilaku keamanan Indonesia terhadap peningkatan kapabilitas militernya, penulis mencoba untuk menggunakan teori *non offensive defence* atau dikenal dengan NOD, merupakan teori yang mulai diperdebatkan setelah berakhirnya perang dingin, NOD merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh defensif realis. Sementara ofensif realis menjelaskan mengenai penyebab perang dingin dimana menekankan bahwa negara harus memaksimalkan *power* untuk dapat bertahan dalam sistem internasional yang bersifat anarki, dalam menjelaskan mengenai perang dingin, ofensif realis cenderung untuk menjelaskan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh US dan AS yang sama-sama menitikberatkan militernya pada hal-hal yang bersifat ofensif, dan kemudian hal-hal yang ofensif inilah yang menyebabkan terjadinya *security dilemma* pada saat itu yang dilatarbelakangi oleh adanya rasa saling mencurigai dan ketidakpercayaan.

Sementara itu defensif realis dengan salah satu teorinya yakni NOD yang membutuhkan *trust* dalam interaksinya, *trust* dalam NOD adalah suatu fungsi dari perkiraan bahwa suatu negara tidak akan melakukan ancaman dengan sengaja baik itu ancaman terhadap kepentingan maupun ancaman terhadap keberlangsungan

hidup suatu negara<sup>32</sup>. Lawan dari *trust* adalah *mistrust* dimana, jika suatu negara memiliki hal yang mengancam negara lain, maka negara lain tersebut tentu akan melakukan perlawanan.

NOD sendiri mempercayai bahwa negara-negara yang tidak memiliki keinginan atau ambisi untuk melakukan penaklukan (imperialistik) ataupun penyerangan terhadap negara lain cenderung untuk melakukan hal-hal yang defensif untuk menjaga batas-batas teritorial, integrasi, dan kedaulatannya<sup>33</sup>. Defensif realis secara umum menyatakan bahwa negara-negara yang selalu mencari *security* dengan pendekatan defensif, tidak akan pernah mencoba dengan sengaja mengancam keamanan negara lainnya.

*Non-offensive defence* merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh defensif realis, para defensif realis percaya bahwa secara fundamental sifat alami dari politik internasional adalah bersifat konfliktual dan konflik yang terjadi antara negara-negara biasanya sangat jelas terlihat, maka oleh sebab itu, defensif realis mempertimbangkan bahwa suatu perlombaan senjata secara umum dapat terjadi bagi negara-negara yang sedang mencari kemandirian dan perlindungan terhadap batas-batas teritorial mereka, tetapi menjadi kurang optimal ketika negara tersebut tidak menghadapi ancaman nyata yang sedang terjadi<sup>34</sup>. Jadi disini, defensif realis meyakini bahwa perlombaan senjata antara negara-negara dapat terjadi jika memang diiringi oleh ancaman yang benar-benar nyata yang menghampiri negara yang bersangkutan, defensif realis beranggapan bahwa perlombaan senjata

---

<sup>32</sup>Shiping Tang. *A Theory of Security Strategy for Our Time. Defensive Realism* (New York : Palgrave McMillan: 2010)

<sup>33</sup>Bjorn Moeller. *The Post Cold War- (ir)Relevance of Non-Offensive Defence*. Copenhagen of Research Peace Institute. 13-15 April 1997

<sup>34</sup>Shiping Tang. *A Theory of Security Strategy for Our Time. Defensive Realism*

merupakan sebuah *rational choice*, tetapi hanya jika suatu negara menghadapi sebuah negara atau beberapa negara yang memperlihatkan maksud dan tanda-tanda yang agresif<sup>35</sup>.

Seperti yang dinyatakan di awal, sifat utama dari *non-offensive defence* (defensif realis) adalah defensif, negara yang memilih doktrin defensif tentu menghindari hal-hal yang bersifat ofensif, provokatif, dan konfrontatif dalam hal ini tidak bertujuan untuk melakukan penaklukan dan penambahan wilayah, maka dengan adanya kemungkinan suatu negara mengadopsi doktrin-doktrin defensif maka negara-negara tersebut cenderung untuk memilih persenjataan yang bersifat defensif. NOD sendiri dalam defenisinya menyatakan bahwa NOD merupakan sebuah strategi terkait dengan militer, postur militer yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material, yang mana maksudnya adalah mampu memaksimalkan kekuatan defensif sekaligus meminimalkan pilihan-pilihan ofensif yang dapat menimbulkan ancaman terhadap negara lain<sup>36</sup>. Disini dinyatakan bahwa, negara-negara yang mangadopsi NOD cenderung untuk memilih persenjataan yang bersifat defensif tetapi juga harus dikombinasikan dengan sedikit persenjataan yang bersifat ofensif, dengan maksud, jika memang perang tidak dapat dihindari, maka negara yang memiliki kemampuan NOD bisa juga melakukan serangan balasan terhadap musuh/negara penyerang. Walaupun negara yang menganut NOD bersifat defensif tidak berarti menghilangkan kemampuan negara tersebut untuk melakukan penyerangan atau dalam hal ini balasan terhadap negara penyerang. Dalam hal pengkategorian senjata yang bersifat ofensif atau defensif, NOD menyatakan

---

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Bjorn Moeller, *The Post Cold War- (ir)Relevance of Non-Offensive Defence*

bahwa perbedaan antara senjata ofensif dengan defensif adalah dalam hal mobilitas persenjataan tersebut, dimana jika persenjataan itu bersifat ofensif maka memiliki mobilitas yang tinggi yang memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan serangan di luar batas-batas wilayah suatu negara (contoh: pesawat bomber, dan kapal selam), sedangkan persenjataan defensif memiliki kemampuan dengan mobilitas yang rendah yang tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan diluar batas-batas teritorial suatu negara (contoh: tank, kendaraan infanteri, anti-tank, ranjau, dsb)

Setelah dijabarkan diatas, maka dapat dihubungkan bahwa peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Indonesia tergolong kepada upaya-upaya Indonesia untuk mengamankan batas-batas teritorial dan kedaulatannya dari ancaman eksternal yang mungkin terjadi tanpa harus menimbulkan ancaman dan provokasi terhadap negara lain. Dalam prosesnya Indonesia memang melakukan peningkatan kapabilitas militer tanpa menimbulkan ancaman terhadap negara lain di dalam kawasan yang sama.

Dalam hal fungsional, Bjorn menyatakan bahwa, pilihan akan militer yang bersifat ofensif maupun defensif datang dari keinginan dan ambisi dari suatu negara<sup>37</sup>. Selama negara-negara tersebut merasa percaya diri bahwa negara tetangga mereka bersahabat dan memiliki pemikiran militer yang defensif, maka negara tersebut tidak akan memikirkan persenjataan mereka sama sekali, jadi disini dikatakan bahwa pilihan negara terhadap pilihan militer akan membawa negara tersebut kedalam suatu kondisi apakah damai atau saling bermusuhan<sup>38</sup>. Untuk

---

<sup>37</sup>*ibid*

<sup>38</sup>*ibid*

menentukan suatu negara bersifat defensif atau ofensif dapat dilihat dari konsepsi vital kepentingan nasional mereka dimana kepentingan nasional merupakan elemen penting dari *grand strategy* maupun doktrin militer<sup>39</sup>. Seperti yang sudah dijelaskan dalam buku putih pertahanan Indonesia, konsepsi *vital* kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif baik itu bagi stabilitas regional maupun global<sup>40</sup>. Serta bagaimana menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri<sup>41</sup>.

Dalam Teori *Non-offensive defence* sendiri dinyatakan bahwa dalam pembentukan militer suatu negara, sebaiknya negara tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan *Force to space ratio* atau *force to force ratio*. Dalam hal ini, Indonesia mencoba untuk membangun postur pertahanan militer jangka panjang atau lebih dikenal dengan *minimum essential force* (MEF), yang mana dalam konsepsinya, MEF ini bertujuan untuk memenuhi kemampuan pokok militer Indonesia yang mampu melindungi batas-batas teritorial maupun ancaman kedaulatan NKRI oleh ancaman dari kekuatan-kekuatan eksternal. Konsepsi MEF ini bisa dikategorikan sebagai *force to space ratio*, dimana Indonesia sudah memperhitungkan total kemampuan perlindungan militer terhadap luas wilayah yang harus dilindungi.

Disini dikatakan bahwa hal yang paling dianggap sebagai tingkatan penting dari ambisi defensif adalah keinginan untuk mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional<sup>42</sup>. Sedangkan jika dikatakan ofensif maka lebih cocok

---

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup> Buku putih pertahanan indonesia, hal 39

<sup>41</sup>*Ibid, hal 41*

<sup>42</sup>Bjorn Moeller. *The Post Cold War- (ir)Relevance of Non-Offensive Defence*.

digunakan untuk negara yang memiliki koloni yang setidaknya membutuhkan jangkauan pertahanan secara global. Setidaknya tindakan yang bersifat ofensif merupakan sebuah ambisi terhadap penambahan wilayah teritorial<sup>43</sup>.

### **1.8 *Mistrust* Sebagai Elemen Ancaman**

Berdasarkan pemikiran defensif realis dalam menjelaskan mengenai perilaku keamanan penulis mencoba menggunakan "*mistrust*" sebagai salah satu elemen ancaman keamanan. *Mistrust* menyebabkan sebuah negara dapat melakukan ancaman terhadap negara lain, sehingga muncul "*fear dan sense of insecurity*". dan karena itu negara melakukan peningkatan kapabilitas militer.

Indonesia menginginkan adanya *power* untuk menjaga dan mengendalikan keamanan dan perdamaian di kawasan. Ini berarti Indonesia tidak mungkin melakukan hal-hal yang bersifat konfrontatif dan provokatif yang membahayakan stabilitas keamanan itu sendiri seperti perilaku ofensif.

Konsep MEF untuk sementara dapat dianggap sejalan dengan teori NOD, namun masih membutuhkan banyak kajian untuk mengetahui kesimetrisannya, juga akibatnya kepada kekuasaan keamanan. Jika NOD diterapkan pada negara seperti Amerika yang sudah memiliki doktrin ofensif maka NOD tidak akan berlaku, tetapi jika diterapkan juga maka akan cocok menggunakan teori "*arms control*". Definisi NOD sendiri adalah memaksimalkan kekuatan defensif sekaligus meminimalkan kekuatan ofensif, pertanyaannya, kenapa tidak hanya menggunakan kekuatan defensif tanpa harus ada kekuatan ofensif?

---

<sup>43</sup>*Ibid*

Dari gejala-gejala yang ada diketahui bahwa kekuatan ofensif yang kecil masih diperlukan, jika saja memang perang sudah tidak dapat dihindarkan, maka, kekuatan ofensif berguna sebagai senjata *counter-attack*. Contoh pembelian kapal selam oleh Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ofensif karena mobilitas yang tinggi.

NOD menyatakan bahwa, memaksimalkan kekuatan defensif dengan meminimalkan kekuatan ofensif, intinya terletak pada tingkat mobilitas persenjataan tersebut, dimana persenjataan seperti *bomber* dapat dikatakan senjata ofensif karena mobilitas yang tinggi. Bagi Indonesia tank merupakan persenjataan yang defensif karena tank memiliki keterbatasan mobilitas di negara kepulauan, sehingga kecenderungan untuk *cross border attack* sangat kecil sekali.

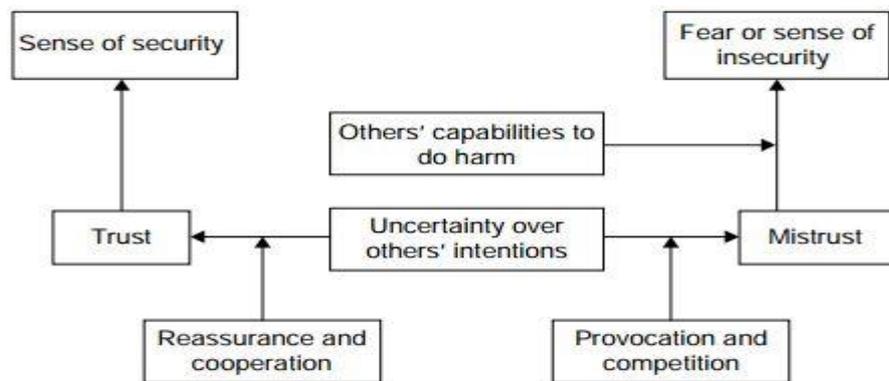
Dalam contoh kasus, misalnya perlombaan senjata antara Indonesia dan Malaysia, jika menggunakan teori NOD, maka suatu perlombaan senjata dapat saja terjadi jika, memang suatu negara benar-benar menghadapi ancaman dari negara lain, dan beranggapan bahwa perlombaan senjata merupakan sebuah *rational choice*.

Setelah Malaysia melakukan berbagai provokasi militer di kawasan teritorial Indonesia khususnya Ambalat, maka jelaslah unsur *trust* berubah menjadi *mistrust*, yang berujung dan berakibat timbulnya *fear dan sense of insecurity*, bagi Malaysia. Bagi Indonesia *fear dan sense of insecurity* ini di konversikan kedalam pembangunan kekuatan minimum essential (MEF) yang bersifat defensif dengan asumsi Indonesia sudah memperhitungkan berapa luas daerah yang harus dilindungi dari ancaman dan wilayah mana saja yang harus dilindungi. Nyatanya

Indonesia juga telah membangun pangkalan kapal selam di kepulauan sulawesi atau lebih tepatnya di laut sulawesi yang berdekatan dengan blok ambalat yang berbatasan dengan Malaysia sebagai tindakan yang bisa saja dilihat ofensif oleh negara-negara sekitar akibat dari *mistrust*.

Untuk memudahkan analisa model analisa berikut akan digunakan sebagai acuan

**Gambar 1. Model analisa : Trust versus Mistrust**



Sumber : Shiping Tang, *A Theory of Security Strategy For Our Time : Defensive Realism*, ( New York : Palgrave Macmillan, 2010), hal. 132.

## 1.9 Metodologi Penelitian

Metode merupakan prosedur atau proses yang melibatkan berbagai teknik dan perangkat yang digunakan dalam penelitian dan bagi pengujian serta evaluasi teori. Penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi dan pemahaman terhadap serangkaian informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian menggunakan model pendekatan deskriptif-analisis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini digunakan untuk

memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti<sup>44</sup>.

### **1.9.1 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya kepada upaya Indonesia dalam melakukan upaya peningkatan kapabilitas militer di dua masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia, serta tujuan dari peningkatan kapabilitas militer ini. Penentuan batasan penelitian dilakukan agar penelitian ini tidak keluar dari dan meluas dari kerangka dan rumusan masalah yang telah ditentukan.

### **1.9.2 Tingkat Analisa dan Unit Analisa**

Sebelum menentukan tingkat analisa dalam suatu penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan terhadap unit analisa dan unit ekplanasi. Unit analisa adalah objek yang perilakunya hendak kita teliti. Unit ekplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan<sup>45</sup>. Unit analisa dari penelitian ini adalah Indonesia ini sedangkan unit ekplanasinya adalah kebijakan pertahanan Indonesia. Jadi tingkat analisa dari penelitian ini adalah pada level sub-sistem yaitu regional/kawasan

---

<sup>44</sup>Dr. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000),6

<sup>45</sup> Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*”, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 35-39

### **1.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang sudah umum dilakukan dalam penelitian kualitatif, yakni melalui tinjauan dokumen berupa catatan dan arsip yang terdapat pada masyarakat, komunitas dan organisasi<sup>46</sup>. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan peristiwa, artikel, review penelitian, *media report*, *press released* dan sebagainya. Dan berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dinamika dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini serta artikel-artikel tentang dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara dan khususnya tindakan Indonesia dalam menanggapi perubahan peta keamanan di kawasan Asia Tenggara, dan juga beberapa situs resmi terkait dan dianggap relevan dengan penelitian ini.

### **1.9.4 Teknik Pengolahan Data**

Mengingat banyaknya sumber informasi yang diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber, dokumen dan informasi yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan dan kemudian dokumen dan informasi di deskripsikan secara tekstual. Melalui prosedur kualitatif, data-data dianalisis, menetapkan, menguraikan, dan mendokumentasikan alur sebab/konteks dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>46</sup>Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, "Designing Qualitative Research 3e". California: Sage Publication Inc, 1999, hal.117

### 1.9.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, Analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan<sup>47</sup>. Interpretasi atas data-data yang termasuk kedalam data-data objektif yang relevan untuk menambah informasi atau bisa menjadi petunjuk untuk menjelaskan bagian-bagian dan hubungan-hubungan antar bagian yang terdapat dalam model analisa. Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang digambarkan berupa fakta-fakta, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 150

